

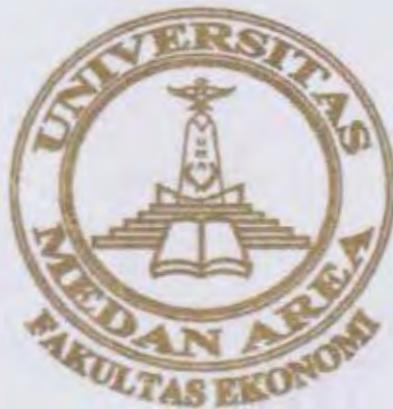
**ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PENENTUAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**SUPRIYATMINI
NPM : 10 833 0044**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dalam
Penerapan Opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Pada Badan Pemaksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Medan

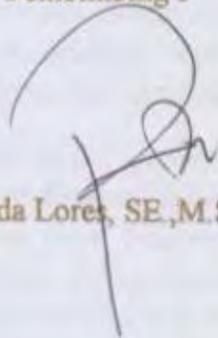
Medan Nama Mahasiswa : SUPRIYATMINI

No. Stambuk : 10 833 0044

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Linda Lores, SE, M.Si)

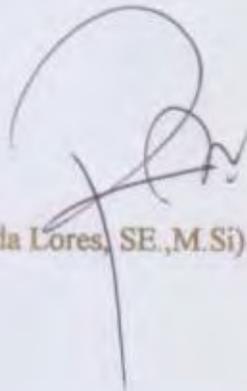
Pembimbing II



(Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA)

Mengarahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tema hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan oleh entitas pelaporan dengan opini yang diberikan auditor dalam rangka pemeriksaan keuangan yang selama ini menjadi polemik bagi keduanya. Penelitian ini menggunakan uji statistik dalam mengolah data yang ada sehingga diperlukan penilaian profesional untuk mengakomodasi penginterpretasian keaharan data. Untuk itulah penelitian ini membutuhkan banyak keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan, baik auditor (BPK), entitas pelaporan (pemerintah daerah), maupun pembina sistem pengendalian intern pemerintah (BPKP). Penelitian ini sudah mengakomodasi hal tersebut, namun masih diperlukan keterangan dari pihak-pihak tersebut untuk memperdalam lingkup penelitian ini.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang diimplementasikan secara memadai oleh entitas akan berbanding terbalik dengan jumlah kasus penyimpangan sistem pengendalian intern yang terjadi pada suatu entitas pelaporan, sehingga dapat diketahui bahwa SPI akan berbanding lurus dengan opini atas laporan keuangan.

Kerangka pengendalian intern berdasarkan COSO tidak hanya mempertimbangkan penilaian atas pengendalian keras (*hard controls*) seperti pemisahan tugas, pengawasan aset, sistem pencatatan, dan pemantauan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak (*soft controls*) seperti integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya operasi manajemen. Sistem COSO tersebut harus diadaptasikan dengan lingkungan pemerintahan di Indonesia yang sudah terbentuk. Hal inilah yang menjadi pengharob sistem ini diterapkan pada berbagai lapisan pemerintahan

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis mengucapkan kebadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dalam Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.H.A Ya'kub Matondang, MA, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.H.Sya'ad Afifudin, SE, Mec selaku dekan fakultas ekonomi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan skripsi ini.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi selaku Ketua Jurusan akuntansi
5. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi selaku dosen pembimbing I terima kasih atas bimbingannya.
6. Ibu Dra. Hj.Rosmaini, AK,MMA selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas saran dan bimbingannya.
7. Bapak/Ibu staf pengajar dan segenap pegawai administrasi Universitas Medan Area.
8. Kedua Orang Tua Saya tercinta, terima kasih untuk tiap untaian doa yang selalu terucap, untuk semua jerih payah, untuk restu dan dukungan yang tak ternilai sehingga putrimu ringan untuk melangkah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan.

Medan, 2013

Supriyatmini

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vj
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Sistem Pengendalian Intern.....	8
2. Opini Audit atas Laporan Keuangan.....	13
3. Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	21
B. Kerangka Konseptual.....	22
C. Hipotesis.....	25
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Populasi dan Sampel.....	26
C. Definisi Operasional.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data	29

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan	33

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

1. Proses dan Teknik Pengawasan.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	19

DAFTAR TABEL

1. Rincian Waktu Penelitian.....	21
2. Jumlah Staff Pengajar/Guru.....	22
3. Instrumen Skala Likert.....	25
4. Interval Koefisien Korelasi.....	26
5. Jenis Kelamin Responden.....	38
6. Usia Responden.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Par 01-1). Setiap entitas pelaporan, baik entitas komersial maupun pemerintahan, memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangannya, tidak terkecuali pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. Laporan keuangan tersebut menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 184 ayat 1).

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 25).

Pernyataan tanggung jawab tersebut selain harus menyatakan bahwa laporan keuangan itu isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, juga harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut tidak lepas dari efektivitas implementasi sistem pengendalian intern yang melekat pada entitas yang bersangkutan. Sistem pengendalian intern merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat diandalkan. Sistem pengendalian intern yang efektif juga dapat memberikan pola manajemen yang baik terhadap entitas.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh auditor yang independen. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Elder, Beasley, 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu edisi sembilan*, PT Indeks Gramedia, Jakarta.
- Universitas Medan Area, 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan.
- Jusup, Haryono, 2001. *Auditing (Pengauditan)*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- BPK RI, 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan BPK RI*, Jakarta.
- BPK RI, 2011. *Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- BPK RI, 2007. *Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta.
- BPK RI, 2011. *Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) BPK RI Semester II Tahun 2011*, Jakarta.
- Konrath, Larry F, 2002. *Auditing: A Risk Analysis Approach-5th edition*, The Thomson Learning, Ohio.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.

Mukti, Ramakerta, Kutipan, Catatan Kaki, dan Catatan Tubuh, ramahertamukti.files.wordpress.com (akses 27 Agustus 2012)

Robert R. Moeller, 2007. *COSO Enterprise Risk Management-Understanding The New Integrated ERM Framework*, John Wiley and Sons Inc., United States.

S., Romi, 2008. *Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK*. Majalah Pemeriksaan. Jakarta

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesembilan*, Alfabeta, Bandung.

Swastika, Agung, 2008. *Sistem Pengendalian Intern pada Entitas Pemerintahan*, Majalah Pemeriksaan, Jakarta.

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENENTUAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

I. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Jabatan/Peran :
Pendidikan : D3/S1/S2/S3
Jurusan :
Masa Kerja :Tahun....Bulan

Medan, 2013

SUPRIYATMINO

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Output	Keterangan
1	<p>Lingkungan Pengendalian</p> <p>a. Integritas dan Nilai Etika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah KDb beserta pejabat dibawahnya memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai- nilai etika? 2) Apakah Kab/kota memiliki kode etik yang ditetapkan dalam rangka kegiatan operasional?. 3) Apakah kode etik tersebut secara periodik disosialisasikan pada seluruh pegawai? 4) Apakah para pegawai memahami tindakan yang etis /tidak etis 5) Apakah para pegawai mengetahui apa yang dilakukan dalam menyikapi penyimpangan? 6) Apabila tidak ada kode etik tertulis ? 7) Apakah kdh dan pejabat dibawahnya memberikan respon yang memadai terhadap pelanggaran kode etik? 8) Apakah hukuman disiplin kerja terhadap pelanggaran dikomunikasikan secara luas kepada para pegawai? 9) Apakah penyimpangan dari ketentuan yang ada telah diproses dan didokumentasikan? <p>b. Komitmen terhadap Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah telah terdapat uraian pekerjaan yang menjelaskan tugas suatu pekerjaan /posisi tertentu sesuai kebutuhan pemda? 2) Apakah terdapat ketentuan mengenai tingkat kompetensi yang dibutuhkan suatu pekerjaan tertentu? 3) Apakah ada bukti yang dapat menyakinkan bahwa seorang pegawai telah ditempatkan sesuai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan? <p>c. Gaya operasi dan filosofi manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah Kdh dan pejabat dibawahnya menerapkan prinsip kehati-hatian? 2) Apakah Kdh dan pejabat dibawahnya banyan akan bertindak setelah melalui analisis terhadap risiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh? 3) Apakah asset yang dimiliki pemda dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang? 4) Apakah pertemuan koordinasi antar unit pelaksana teknis dengan penanggung jawab rutin dilakukan? <p>d. Struktur organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah Kdh dan pejabat dibawahnya telah memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki? 2) Apakah para kepala SKPD memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif? 3) Apakah hubungan pelaporan yang ada <p>e. Tanggung jawab dan wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah setiap jenjang jabatan memiliki wewenang dan tanggung jawab ? 2) Apakah pengambilan keputusan dikaitkan dengan wewenang 				

	<p>dan tanggung jawab ?</p> <p>3) Apakah terdapat standard an prosedur yang terkait dengan pengendalian, termasuk uraian kegiatan masing-masing jabatan ?</p> <p>f. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia</p> <p>1) Apakah terdapat prosedur dan kebijakan tertulis dalam dan penggunaan pelatihan promosi dan penggajian pegawai ?</p> <p>2) Apakah kepada pegawai baru diberikan pengertian tentang tanggung jawab dan harapan mereka?</p> <p>3) Apakah nilai etika dan integritas merupakan kriteria dalam penilaian kinerja?</p> <p>4) Apakah evaluasi kinerja dan pedoman etika menjadi salah satu kriteria dalam promosi</p> <p>g. Kegiatan pengawasan</p> <p>1) Apakah inspektorat melakukan pengawasan dan reuiu atas kegiatan secara independen?</p> <p>2) Apakah lingkup kegiatan inspektorat telah ditetapkan dengan jelas ?</p> <p>3) Apakah pekerjaan pengawasan oleh inspektorat ditujukan untuk perbaikan kegiatan operasional?</p> <p>4) Apakah telah ditetapkan prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan inspektorat?</p>				
--	--	--	--	--	--

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	output	Keterangan
2	Penilaian Resiko				
	<p>a. Penetapan tujuan Organisasi</p> <p>1) Apakah pemda telah menetapkan tujuan umum organisasi dalam bentuk visi.misi,tujuan, dan sasaran?</p> <p>2) Apakah rencana strategis mendukung visi,misi,tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan?</p> <p>3) Apakah rencana strategis memerhatikan aiukasi sumber daya manusia dan skala prioritas?</p> <p>4) Apakah rencana strategis dan anggaran didesain melalui berbagai tingkatan unit kerja?</p> <p>b. Penetapan tujuan kegiatan operasional</p> <p>1) Apakah APBD telah disusun sesuai dengan visi,misi,tujuan dan sasaran ?</p> <p>2) Apakah tujuan setiap aktifitas SKPD sudah ditetapkan?</p> <p>3) Apakah kdh dan pejabat dibawahnya sudah mengidentifikasi hal-hal yang harus dicapai untuk mencapai tujuan?</p> <p>4) Apakah sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan sudah diidentifikasi?</p>				

<p>c. Identifikasi Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah sudah digunakan metode penilaian risiko untuk menentukan urutan resiko relative secara periodic? 2) Apakah risiko yang diidentifikasi diurutkan, dianalisa dan diminimalkan sudah dikomunikasikan kepada pegawai? 3) Apakah diskusi tentang identifikasi risiko terjadi sebagai pertimbangan dari temuan pemeriksaan evaluasi atau penilaian lainnya? 4) Apakah sudah diidentifikasi risiko yang berkaitan dengan berkesinambungan program? 5) Apakah diidentifikasi risiko sudah diperhitungkan dalam rencana jangka pendek dan rencana strategis jangka panjang? <p>d. Analisa Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah telah ditetapkan proses formal untuk menganalisis risiko termasuk proses informal berdasarkan aktifitas sehari-hari? 2) Apakah terdapat kriteria dalam menetapkan tingkat risiko rendah? 3) Apakah tingkat pejabat dan pegawai sudah terlibat dalam analisis risiko? 4) Apakah risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan yang ditetapkan? <p>e. Mengelola Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah sudah dianalisis seluruh operasional satuan kerja yang dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan? 2) Apakah perubahan-perubahan yang rutin sudah diperhitungkan dalam proses identifikasi risiko yang sudah baku? 3) Apakah sudah ada penentuan tentang bagaimana mengelola atau meminimalkan risiko dengan baik termasuk tindakan-tindakan yang harus diambil? 4) Apakah pendekatan terhadap risiko sudah disediakan untuk menjaga tingkat risiko pada tingkat yang ditoleransi? 5) Apakah sudah ditetapkan aktivitas pengendalian. 				
---	--	--	--	--

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Output	Keterangan
3	Aktivitas Pengendalian				
	a. Pelaksanaan rewiu oleh manajemen pada tingkat atas				
	1) Apakah terdapat mekanisme rewiu dari kdh untuk mengawasi				

<p>pencapaian satuan kerja terhadap rencana yang telah dibuat?</p> <p>2) Apakah kepala skpd mengawasi pencapaian unit kerja terhadap rencana yang telah dibuat sesuai mechanism reuiu yang ada?</p> <p>3) Apakah tindak lanjut hasil reuiu dilaksanakan oleh unit-unit terkait ?</p> <p>b. Mereuiu pengelolaan SDM</p> <p>1) Apakah harapan K0h dan pejabat di bawahnya terdapat pencapaian tujuan telah didokumentasikan dan dikomunikasikan</p> <p>2) Apakah terdapat rencana strategis mengenai pengelolaan pegawai ?</p> <p>3) Apakah telah terdapat prosedur guna memastikan bahwa pegawai yang direkrut maupun di pertahankan adalah mereka yang benar-benar memiliki kompetensi ?</p> <p>4) Apakah kepada pegawai telah diberikan orientasi ,pelatihan,dan dukungan lainnya dalam rangka menjalankan tugasnya ?</p> <p>5)Apakah terdapat mekanisme promosi dan mutasi yang jelas ?</p> <p>c. Mereuiu pengelolaan Informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi</p> <p>{1) Apakah pembukuan semua transaksi dilakukan secara berurut ?</p> <p>{2) Apakah jumlah-jumlah transaksi telah di cocokan dengan jumlah pengendall ?</p> <p>{3} Apakah akses ke data dan dokumen lain di kendalikan ?</p> <p>d. Menetapkan dan memantau indikator dan ukuran kinerja</p> <p>{1} Apakah Indikator dan ukuran kinerja telah dibuat untuk setiap bagian dan level dalam organisasi sampai kepada Individu ?</p> <p>{2} Apakah terdapat indikator tersebut telah dilakukan reuiu dan validasi secara periodic ?</p> <p>{3} Apakah data mengenai kinerja aktual senantiasa ditandlنگkan dengan tujuan yang akan dicapai dan jika ada perbedaan apakah akan dilakukan analisis ?</p> <p>e. Pemisahan tugas atau fungsi</p> <p>{1) Apakah kewenangan untuk mengendalikan seluruh aktifitas utama dipisahkan ?</p> <p>{2} Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara fungsi otoritas,persetujuan,pemrosesan,pencatatan,pembayara/penerima</p>			
--	--	--	--

aan uang , pemeriksaan dan fungsi penyimpangan ?

f. Mereviu otorisasi transaksi

- 1) apakah transaksi yang diakui hanya transaksi – transaksi yang valid sesuai ketentuan?
- 2) apakah suatu transaksi hanya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang

g. Mereviu pencatatan atas transaksi

(1)Apakah setiap transaksi telah diklasifikasi dan dicatat secara memadai guna mendukung pengendalian kegiatan dan pengambilan keputusan?

(2)apakah pengklasifikasian dan pencatatan tersebut telah meliputi seluruh siklus mulai dari otorisasi, persetujuan, pemrosesan sampai dengan klasifikasi final dalam pencatatan secara keseluruhan?

h. Membuat pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan-catatan:

(1)Apakah terdapat pembatasan terhadap akses atas sumber daya dan catatan?

(2)Apakah standar, prosedur dan operasi atas pembatasan akses telah ditetapkan?

(3)Apakah pegawai yang memiliki hak akses telah ditetapkan?

i. Pendokumentasian

(1)Apakah sistem pengadilan internal, semua transaksi dan kejadian penting lainnya telah didokumentasikan?

(2)Apakah dokumentasi tersebut selalu tersedia untuk kepentingan pengujian?

(3)Apakah dokumentasi terhadap transaksi maupun kegiatan penting lainnya telah dilakukan secara lengkap dan akurat sehingga memungkinkan dilakukannya penelusuran ?

(4)Apakah dokumentasi tersebut, baik tertulis maupun secara elektronik, berguna bagi proses evaluasi , analisis, dan pengendalian?

4. Informasi dan komunikasi

a. Informasi

- (1)Apakah Informasi diidentifikasi, diperoleh, diproses, dan dilaporkan melalui suatu sistem Informasi?
- (2)Apakah pimpinan entitas memperoleh informasi yang dibutuhkan guna melaksanakan tanggung jawabnya?
- (3)Apakah terhadap mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi orang yang tepat secara tepat waktu guna membantu mereka melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien?
- (4)Apakah para kepala SKPD memperoleh informasi analitis yang membantu mereka dalam mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil?
- (5)Apakah informasi yang jelas dan tepat tersedia bagi berbagai tingkatan pimpinan satuan kerja dan unit kerja?
- (6)Apakah terdapat rencana strategis sistem informasi?
- (7)Apakah sumber daya di bidang sistem informasi tersedia sesuai kebutuhan?

b. Komunikasi

- (1)Apakah tugas dan tanggung jawab pengendalian pegawai dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi yang efektif?
- (2)Apakah terdapat bentuk/saluran komunikasi bagi setiap untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan?
- (3)Apakah para pegawai benar-benar menggunakan bentuk /saluran komunikasi yang ada untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan ?
- (4)Apakah terdapat mekanisme bagi pegawai untuk menyampaikan saran-saran perbaikan?
- (5)Apakah pimpinan entitas memberikan penghargaan kepada pegawai yang memberikan saran yang baik?
- (6)Apakah komunikasi antar satuan kerja telah dilakukan secara memadai?
- (8)Apakah pegawai senantiasa melaporkan masalah yang terjadi dan

<p>laporan tersebut ditindaklanjuti?</p>				
<p>c. Bentuk dan alat komunikasi</p> <p>(1) Apakah KDh dan pejabat dibawahnya menggunakan metode komunikasi efektif seperti: kebijakan dan prosedur, arahan pimpinan, memo, pembentahan, e-mail, dan pidato-pidato?</p> <p>(2) Apakah KDh dan pejabat dibawahnya menyebarluaskan nomor handphone, e-mail untuk menampung semua informasi dari berbagai kalangan masyarakat?</p> <p>(3) Apakah terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang mendesak?</p> <p>(4) Apakah KDh dan pejabat d bawahnya memonitor secara kontinu kualitas informasi yang diperoleh, dipelihara, dan dikomunikasikan telah sesuai dengan materi, waktu, akurasi, dan akses yang dibutuhkan?</p> <p>(5) Apakah terdapat dukungan KDh dan pejabat dibawahnya bagi pengembangan teknologi informasi yang ditunjukkan dengan komitmen organisasi dalam menyediakan sumberdaya manusia dan keuangan?</p>				
<p>5. Pemantuan</p> <p>a. pemantuan berkelanjutan (ongoing monitoring)</p> <p>(1) Apakah KDh dan pejabat dibawahnya memiliki strategi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemantauan berkelanjutan?</p> <p>(2) Apakah pihak ketiga (masyarakat) juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan?</p> <p>(3) Apakah keluhan-keluhan masyarakat dan pihak lain dapat segera ditindaklanjuti?</p> <p>(4) Apakah komunikasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan dalam rangka pemantauan?</p> <p>(5) Apakah struktur organisasi dan kegiatan supervise yang ada dapat membantu pemantauan terhadap fungsi SPI?</p> <p>(6) Apakah pembagian tugas dan tanggung jawab digunakan untuk</p>				

<p>membantu pendeteksian kecurangan?</p> <p>(7)Apakah inspektorat adalah badan yang independen dan mempunyai kewenangan untuk melaporkan secara langsung kepada KDh?</p> <p>(8)Apakah kegiatan pemeriksaan inspektorat dapat dilaksanakan secara efektif?</p> <p>(9)Apakah pegawai pemeriksa inspektorat mempunyai tingkat kompetensi dan pengalaman di bidangnya?</p> <p>(10)Apakah penempatan pegawai dan pejabat dalam organisasi inspektorat tepat?</p> <p>(11)Apakah lingkup, tanggung jawab dan perencanaan pemeriksaan inspektorat dapat menjamin pencapaian tujuan pemda?</p> <p>(12)Apakah terdapat jadwal pertemuan rutin dengan para pegawai dalam rangka memperoleh umpan balik mengenai efektifitas SP?</p> <p>b. Penyelesaian hasil pemeriksaan</p> <p>(1)Apakah terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan ataupun reuiu lainnya telah dilakukan penyelesaian dengan tepat?</p> <p>(2)Apakah KDh dan/atau Pejabat dibawahnya melakukan reuiu dan evaluasi atas temuan-temuan pemeriksaan ataupun reuiu lainnya termasuk penyimpangan dan kemungkinan perbaikannya?</p> <p>(3)Apakah KDh dan/atau pejabat dibawahnya menentukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menanggapi temuan dan rekomendasikan?</p> <p>(4)Apakah KDh dan/atau pejabat dibawahnya tanggap temuan dan rekomendasi pemeriksaan ataupun reuiu lainnya yang bertuju kepada perbaikan pengendalian internal?</p> <p>(5)Apakah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan ataupun reuiu lainnya telah dilakukan secara memadai?</p> <p>(6)Apakah masalah-masalah pada transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi secara tepat?</p>				
---	--	--	--	--

<p>(7) Apakah KDH dan/atau pejabat dibawahnya selalu mendapatkan informasi terhadap status dan posisi penyelesaian hasil pemeriksaan?</p> <p>(8) Apakah penyebab terjadinya permasalahan dituangkan dalam temuan rekomendasi telah diselidiki?</p> <p>(9) Apakah penyebab terjadinya permasalahan sebagaimana dituangkan dalam temuan dan rekomendasi telah dilakukan perbaikan?</p>				
--	--	--	--	--